



## **BAB I PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Seluruh kegiatan dimaksud harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Maka berdasarkan Otonomi Daerah yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, akan dapat terwujud apabila penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan pada penanganan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang sepenuhnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang selaras dengan keterbukaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta dengan mengembangkan pola hubungan yang sinergis antara masyarakat, sektor swasta dan Pemerintah Daerah.

Tujuan utama pelaksanaan Otonomi Daerah adalah terwujudnya kemandirian Daerah dan meningkatnya kemampuan Daerah, terutama dalam proses kebijakan publik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai implementasi otonomi daerah menghendaki pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun, disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya diterbitkan lagi Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 lebih mendasari dan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penerbitan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai 5 tahun kedepan, sesuai tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan melalui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut:

#### **"VISI"**

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Penggunaan Sumber Daya Alam yang dimiliki akan dilakukan dengan menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam secara lestari dan diperlukan sinergi antara pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparaturnya pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mewujudkannya. Selain itu perlu juga dukungan pihak swasta (private sector) sehingga keterbatasan baik sumberdaya manusia maupun anggaran dapat dikelola secara bersama dengan tujuan mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **"MISI"**

Misi adalah Dalam upaya menuju visi diatas dan berpedoman terhadap tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan misi sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan publik bidang lingkungan hidup;
2. Peningkatan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

3. Penguatan fungsi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka fungsi pelestarian lingkungan hidup;
4. Meningkatkan advokasi dan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
5. Peningkatan upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### TUJUAN DAN SASARAN

##### Tujuan :

- a. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas
- b. Mewujudkan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab
- c. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung tampung lingkungan hidup
- d. Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- e. Penataan hukum bidang dan lingkungan hidup
- f. Memperdayakan semua pelaku pembangunan dalam upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

##### Sasaran :

- a. Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
- b. Revitalisasi sungai;
- c. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi dan permasalahan lingkungan hidup;
- d. Menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Meningkatkan penataan hukum dan meminimalisasikan tingkat pelanggaran terhadap hukum di bidang lingkungan hidup
- f. Menurunkan lajukan degradasi kerusakan sumberdaya alam dan meningkatkan pengelolaan dan perlindungan terhadap sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati;
- g. Pemulihan pengelolaan sumber daya alam termasuk kegiatan pertambangan dan penggalian yang berdampak pada pencemaran lingkungan

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan IKU yang tercantum dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021, adalah perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Jumlah sasaran strategis dalam Dokumen Renstra ada 2 (Dua) sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Lingkungan Hidup dan kedua sasaran tersebut dikonversi lagi sebagai indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) melalui target 5 (Lima) tahun kedepan yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021.

Kemudian dua sasaran strategis dimaksud diuraikan lagi dalam beberapa indikator kinerja utama masing-masing sebagai prosentase pengawasan, pengendalian, sosialisasi, pengaduan dan penyelesaian kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Adapun parameter yang akan dilakukan pengawasan, pengendalian dan sosialisasi terhadap kualitas udara, air dan tanah serta pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran tabel.

## **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ( DOKUMEN PENETAPAN KINERJA)**

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran tabel dibagian belakang.



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENCAPAIAN KINERJA**

Pengukuran tingkat kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja dengan realisasi riil. Maka untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab yang sepenuhnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang selaras dengan keterbukaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta dengan mengembangkan pola hubungan yang sinergis antara masyarakat, sektor swasta dan Pemerintah Daerah.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; akan dilakukan pengawasan, pengendalian dan sosialisasi terhadap parameter kualitas udara di lokasi 20 titik pantau, parameter kualitas air dilokasi 12 anak sungai dan tanah akan diterbitkan 1 dokumen serta pemahaman masyarakat/pelaku usaha akan lingkungan hidup dititik beratkan pada 13 pelaku usaha. Kemudian jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada 14 pelaku usaha dan jumlah penanganan atau penyelesaian atau tindaklanjut atas pengaduan kasus dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup akan diselesaikan 35 kasus. Penjelasan pada lampiran tabel.

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Anggaran Belanja Langsung seluruh Program dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan dan atau yang belum dapat dilakukan, dapat dilihat pada Laporan Realisasi Keuangan yang merupakan gambaran pencapaian atau penyerapan anggaran berdasarkan jumlah pagu dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun Anggaran 2017.

Adapun rincian masing-masing anggaran untuk program kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung**

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan sebesar Rp. 8.676.825.704,00. atau 91,44% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.064.076.414,95.

2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara terealisasi sebesar Rp 3.328.038.558,00 atau 68,59% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 4.851.842.646,79. Penjelasan pada lampiran tabel.



## BAB IV PENUTUP

### SUMBER DATA KINERJA:

1. Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
2. Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;
3. Laporan Pencapaian Kinerja Kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Lingkungan Hidup Daerah, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. RKA/RKAP dan DPADPPA Tahun Anggaran 2017 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Laporan dan data input dari masing-masing penanggung jawab sasaran dan indikator.

Pj. Kepala,

Alfian Noor, SE  
Pembina TK.I  
NIP. 19690113 199503 1 004



LAMPIRAN A TERDIRI DARI :

- A. LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- B. LAMPIRAN MATRIK PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
- C. LAMPIRAN MATRIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016-2021
- D. LAMPIRAN REALISASI KEUANGAN
- E. LAMPIRAN DATA PENGHARGAAN

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 DLHK sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas udara sumber tidak bergerak.	20 titik pantau
		2. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas air, anak sungai mahakam dan danau.	12 anak sungai
		3. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas tanah.	1 dokumen
		4. Prosentase sosialisasi pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan hidup.	13 pelaku usaha
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan / atau kegiatan terhadap hukum lingkungan	1. Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	14 pelaku usaha
		2. Prosentase penanganan dan/atau penyelesaian dan/atau tindaklanjut atas pengaduan kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	35 kasus

## LAMPIRAN : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan IKU yang tercantum sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021, adalah perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, 6 indikator kinerja dan 6 target kinerja adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas udara sumber tidak bergerak.
		2. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas air, anak sungai mahakam dan danau.
		3. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas tanah.
		4. Prosentase sosialisasi pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan hidup.
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan / atau kegiatan terhadap hukum lingkungan	1. Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
		2. Prosentase penanganan, penyelesaian dan tindaklanjut atas pengaduan kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Sebagaimana telah ditetapkan juga dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021, bahwa IKU Kabupaten untuk tahun 2017 dengan target dan capaian kinerja, bahwa sasaran strategis melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari 3 (tiga) parameter yaitu indeks pencemaran udara, indeks pencemaran air, dan indeks pencemaran tutupan hutan; dengan target 71 dan capaian 62,58.

Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021, masing-masing tahun dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran strategis	IKU	Target 2016	Capaian 2016	Target 2017	Capaian 2017
Meningkatnya pencegahan dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,5	71,03	71	62,58

LAMPIRAN : MATRIK PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi riil sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas udara dan udara ambient/ sumber tidak bergerak;	20 titik pantau	0
		2. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas air, anak sungai mahakam dan danau	12 anak sungai	0
		3. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas tanah;	1 dokumen	0
		4. Prosentase sosialisasi pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan hidup.	13 pelaku usaha	0

LAMPIRAN : MATRIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Capaian kinerja sesuai penganggaran dan terealisasi pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas udara dan udara ambient/ sumber tidak bergerak;	20 titik pantau	0	0
		2. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas air, anak sungai mahakam dan danau	12 anak sungai	0	0
		3. Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas tanah;	1 dokumen	0	0
		4. Prosentase sosialisasi pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan hidup.	13 pelaku usaha	0	0

**Penjelasan 1** :Indikator Kinerja; prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas udara dan udara ambient/ sumber tidak bergerak.

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas udara dan udara ambient/ sumber tidak bergerak, adalah kegiatan pemantauan kualitas udara yang dilakukan melalui pendeteksian pencemaran udara pada 20 titik pantau.

Tetapi dikarenakan jumlah pagu indikatif sesuai dengan kondisi ekonomi Pemerintah Daerah maka rencana kegiatan melalui RKA/RKAP & DPA/DPPA Tahun Anggaran 2017 tidak dapat dialokasikan, sehingga target keuangan yang telah ditetapkan melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terealisasi yang artinya realisasi 0% sehingga pencapaiannya 0%; dapat juga dilihat pada penjelasan rincian realisasi Anggaran Belanja Langsung program dan kegiatan.

**Penjelasan 2 :** Indikator Kinerja; Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas air, anak sungai mahakam dan danau.

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas air, anak sungai mahakam dan danau adalah kegiatan pendeteksian pencemaran pada 12 anak sungai.

Tetapi dikarenakan jumlah pagu indikatif sesuai dengan kondisi ekonomi Pemerintah Daerah maka rencana kegiatan melalui RKA/RKAP & DPA/DPPA Tahun Anggaran 2017 tidak dapat dialokasikan, sehingga target keuangan yang telah ditetapkan melalui Renstra tidak terealisasi yang artinya realisasi 0% sehingga pencapaiannya 0%; dapat juga dilihat pada penjelasan rincian realisasi Anggaran Belanja Langsung pada program dan kegiatan.

**Penjelasan 3 :** Indikator Kinerja Prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas tanah;

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pengawasan dan pengendalian kualitas tanah adalah kegiatan pengendalian kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa melalui pembuatan dokumen 1 buah.

Tetapi dikarenakan jumlah pagu indikatif dan sesuai kondisi ekonomi Pemerintah Daerah maka rencana kegiatan melalui RKA/RKAP & DPA/DPPA Tahun Anggaran 2017 tidak dapat dialokasikan, sehingga target keuangan yang telah ditetapkan melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terealisasi yang artinya realisasi 0% sehingga pencapaiannya 0%; dapat dilihat pada penjelasan rincian realisasi Anggaran Belanja Langsung dari semua program dan kegiatan.

**Penjelasan 4:** Indikator Kinerja Prosentase sosialisasi pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan hidup kec, kel, desa;

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase sosialisasi pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan hidup; pada 13 pelaku usaha dan/atau kegiatan di kecamatan, kelurahan dan desa; yang kemudian akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2017.

Tetapi dikarenakan jumlah pagu indikatif sesuai dengan kondisi ekonomi Pemerintah Daerah maka rencana kegiatan melalui RKA/RKAP pada Tahun Anggaran 2017 tidak dapat dialokasikan, sehingga target keuangan yang telah ditetapkan melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terealisasi yang artinya realisasi 0% sehingga pencapaiannya 0%; dapat juga dilihat pada penjelasan rincian realisasi Anggaran Belanja Langsung pada program dan kegiatan.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan / atau kegiatan terhadap hukum lingkungan	1. Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	14 pelaku usaha	0	0
		2. Prosentase penanganan dan/atau penyelesaian dan/atau tindaklanjut atas pengaduan kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	35 kasus	0	0

**Penjelasan 1 :** Indikator Kinerja prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, adalah kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan menargetkan 14 pelaku usaha yang dilaporkan masyarakat akibat adanya kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tetapi dikarenakan jumlah pagu indikatif sesuai dengan kondisi ekonomi Pemerintah Daerah maka rencana kegiatan melalui RKA/RKAP & DPA/DPPA Tahun Anggaran 2017 tidak dapat dialokasikan, sehingga target keuangan yang telah ditetapkan melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terealisasi yang artinya realisasi 0% sehingga pencapaiannya 0%; dapat juga dilihat pada penjelasan realisasi Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan.

**Penjelasan 2 :** Indikator Kinerja prosentase penanganan dan/atau penyelesaian dan/atau tindaklanjut atas pengaduan kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase penanganan dan/atau penyelesaian dan/atau tindaklanjut atas pengaduan kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah kegiatan melakukan penanganan penyelesaian dan/atau tindaklanjut atas pengaduan kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan menargetkan 35 kasus dugaan pencemaran oleh pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi dikarenakan jumlah pagu indikatif sesuai dengan kondisi ekonomi Pemerintah Daerah maka rencana kegiatan melalui RKA/RKAP & DPA/DPPA Tahun Anggaran 2017 tidak dapat dialokasikan, sehingga target keuangan

yang telah ditetapkan melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terealisasi yang artinya realisasi 0% sehingga pencapaiannya 0%; dapat juga dilihat pada penjelasan realisasi Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan.

Selanjutnya uraian hasil tingkat capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dapat dicapai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Indeks kualitas lingkungan hidup	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	2017	71.00	62,58	62,58

**Penjelasan :** Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk pencemaran air, udara dan tanah/tutupan hutan.

Ukuran capaian indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup untuk pencemaran air, udara dan tanah/tutupan hutan, menargetkan indeks kualitas yang akan dicapai sebesar 71.00, tetapi hanya tercapai 62.58 indeks. Adapun rincian ketiga indeks tersebut menggunakan parameter indeks pencemaran air sebesar 56,15; indeks pencemaran udara 72,46; dan indeks pencemaran tanah/tutupan lahan 59,99 sehingga rata-rata Indeks yang tercapai tahun 2017 adalah 62,58.

Tetapi dikarenakan jumlah pagu indikatif sesuai dengan kondisi ekonomi Pemerintah Daerah maka rencana kegiatan melalui RKA/RKAP & DPA/DPPA Tahun Anggaran 2017 tidak dapat dialokasikan, sehingga target keuangan yang telah ditetapkan melalui Renstra tidak terealisasi yang artinya realisasi 0% sehingga pencapaiannya 0%. Namun karena telah ditetapkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya pada perjanjian kinerja, maka melalui kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan masyarakat dapat tercapai indikator kinerja seperti tersebut diatas.



LAMPIRAN : LAPORAN REALISASI KEUANGAN

Penjelasan rinci realisasi Anggaran Belanja Langsung dari Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	227.818.251,84	230.818.251,84	143.987.238,00	86.831.013,84
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor		41.672.000,00		41.672.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	220.108.400,00	220.108.400,00	126.510.300,00	93.598.100,00
4	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	65.065.357,00	77.331.351,00	76.717.000,00	614.351,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.642.000,00	5.090.000,00	1.552.000,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		100.000.000,00	8.470.000,00	91.530.000,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6.381.000,00	4.595.300,00	1.785.700,00
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	7.919.081,47	15.473.081,00	6.852.432,00	8.620.649,47
9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	820.416.960,00	962.150.980,00	932.689.380,00	29.461.000,00
10	Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan	18.659.419,52	26.129.420,48	26.054.360,00	75.060,48
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	269.936.019,00	509.100.812,00	348.938.498,0	160.166.314,00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
1	Pengadaan Mebeleur		22.845.000,00		22.845.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		27.000.000,00		27.000.000,00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan I Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1	Penyusunan Profil DLHK		25.000.000,00	17.629.600,00	7.370.400,00
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
1	Penyusunan Laporan		95.847.000,00	52.882.000,00	42.965.000,00

	Keuangan Semesteran				
2	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga		1.210.199.75000	1.209.886.250,00	313.500,00
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>				
1	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sampah Produsen/Industri di Kabupaten Kutai Kartanegara		70.000.000,00		70.000.000,00
2	Pembinaan Pengurangan Sampah		70.000.000,00		70.000.000,00
<b>VI</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>				
1	Peningkatan Peringkat kinerja perusahaan (Proper)		50.000.000,00		50.000.000,00
2	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup		100.000.000,00	94.809.200,00	5.190.800,00
3	Monitoring dan Evaluasi Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		200.000.000,00	194.123.400,00	5.876.600,00
4	Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara Beserta Display Sreen	1.700.000,00	28.375.000,00	28.375.000,00	
5	Pemantauan Kualitas Udara dan Air		150.000.000,00		150.000.000,00
6	Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Air Umum dan Kualitas Udara bagi Pelaku Usaha dan Kegiatan Sakala ANDAL dan UKL-UPL		40.000.000,00		40.000.000,00
7	Penanganan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan		50.000.000,00		50.000.000,00
8	Penegakan Hukum Lingkungan		75.000.000,000		75.000.000,000
9	Evaluasi Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah B3		60.000.000,00		60.000.000,00
<b>VI I</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>				
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup		40.000.000,00		40.000.000,00
2	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		69.372.800,00		69.372.800,00
3	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan		30.000.000,00		30.000.000,00
<b>VI II</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>				

1	Publikasi dan Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online		70.000.000,00	50.432.600,00	
<b>IX</b>	<b>Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>				
1	Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Antar Daerah, Provinsi dan Pusat		83.670.300,00		83.670.300,00
<b>X</b>	<b>Program Rehab Lahan Kritis</b>				
1	Pemeliharaan DAS atas IPPKH an.Pemerintah Kab.Kukar		88.725.500,00		88.725.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.656.923.488,83</b>	<b>4.851.842.646,79</b>	<b>3.328.038.558,00</b>	<b>1.523.804.088,79</b>

## LAMPIRAN : DATA PENGHARGAAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melaksanakan pembinaan terhadap beberapa Sekolah dan mendapat Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun Sekolah yang mendapat penghargaan ada 22 (dua puluh dua) sekolah yang terdiri dari :

- SD/Madrasah Ibtidaiyah : 18 sekolah
- SMP/Madrasah Tsanawiyah : 3 sekolah
- SMA/Madrasah Aliyah : 1 sekolah

Sekolah yang menerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 adalah :

NO	Nama	Kecamatan	Nilai
1	SD Negeri 002	Loa Janan	57
2	SD Negeri 003	Loa Janan	59,75
3	SD Negeri 005	Loa Janan	57
4	SD Negeri 006	Loa Janan	56,75
5	SD Negeri 014	Loa Janan	59,75
6	SD Negeri 015	Loa Janan	58,25
7	SMP Negeri 02	Loa Janan	57,75
8	SMP Negeri 03	Loa Janan	58,75
9	SD Negeri 001	Tenggarong	57,75
10	SD Negeri 003	Tenggarong	59,75
11	SD Negeri 004	Tenggarong	57,25
12	SD Negeri 007	Tenggarong	58,75
13	SD Negeri 008	Tenggarong	60
14	SD Negeri 009	Tenggarong	57
15	SD Negeri 015	Tenggarong	57,25
16	SD Negeri 019	Tenggarong	57
17	SD Negeri 020	Tenggarong	58
18	SD Negeri 035	Tenggarong	57,25
19	SD Negeri 015	Tenggarong Seberang	58,75
20	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2	Kota Bangun	59,75
21	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2	Kota Bangun	60
22	Madrasah Aliyah Negeri 1	Kota Bangun	59,75

Program Adiwiyata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 terdapat 6 (enam) perusahaan telah berpartisipasi dalam bentuk pembinaan dan pemberian bantuan sarana prasarana. Ke-6 (enam) perusahaan yang telah berpartisipasi dalam program Adiwiyata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 adalah :

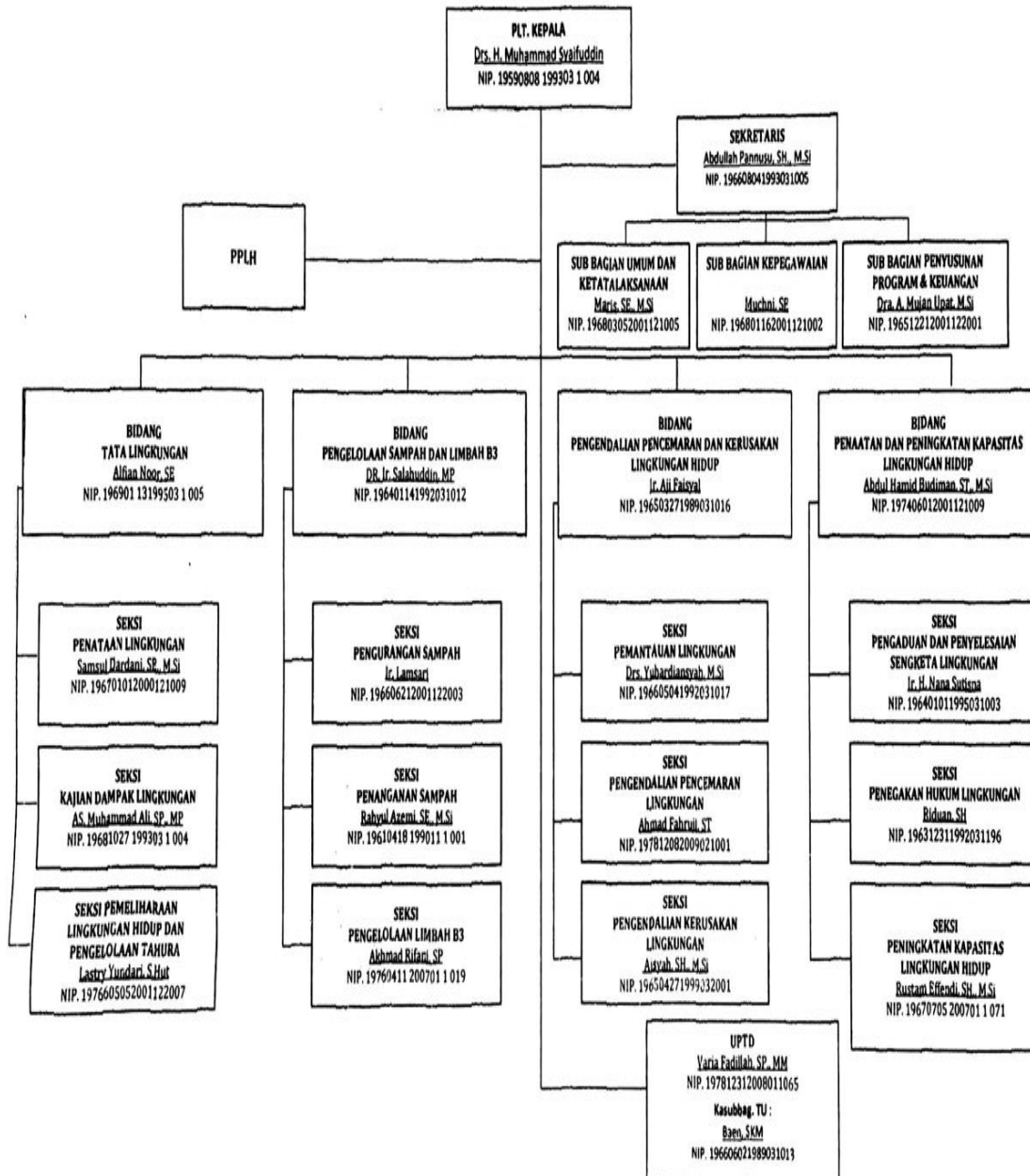
- PT. PAMA Persada Nusantara Loa Janan
- PT. PAMA Persada Nusantara Tenggarong Seberang
- PT. Khotai Makmur Insan Abadi Tenggarong Seberang
- PT. Anugerah Bara Kaltim Loa Janan
- PT. RPP Contractor Indonesia Loa Janan
- PT. Nusa Perdana Indah Loa Janan

**LAMPIRAN B TERDIRI DARI :**

- A. LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI DLHK
- B. LAMPIRAN SK-PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKJIP
- C. LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA BLHD 2016-2012
- D. LAMPIRAN MATRIK RPJMD KABUPATEN 2016-2012
- E. LAMPIRAN MATRIK RENJA DLHK TAHUN ANGGARAN 2017
- F. LAMPIRAN REKAPITULASI RKA/RKAP TAHUN ANGGARAN 2017
- G. LAMPIRAN REKAPITULASI TARGET PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2017
- H. LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG  
TAHUN 2017
- I. LAMPIRAN SK Pjt. KEPALA DINAS TAHUN 2017
- J. LAMPIRAN SK Pj. KEPALA DINAS TAHUN 2018 (Saat Penyusunan  
LKJIP)


## A. LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI DLHK

### DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. KUTAI KARTANEGARA



B. LAMPIRAN SK-PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKJiP

5

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
Alamat : Jalan H. Akhmad Dahlan, Tenggarong Telp & Fax. (0541) 661169, Fax. (0541) 662567  
Website : www.blhd.kutaiartanegarakab.go.id e-mail : blhdkukar@yahoo.co.id  
Kode Pos 75515

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : 660.1/311/SK-Set.3/DLHK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
PELAPORAN KEUANGAN SEMESTER, LKPD, LPPD & LKJiP  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS,

Menimbang :

- a. bahwa laporan keuangan semester sampai laporan keuangan akhir tahun yang kemudian disinkronkan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKJiP) adalah ringkasan capaian kinerja dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semua laporan tersebut diatas wajib disusun menjadi dokumen laporan SKPD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa terhadap kegiatan penyusunan dokumen laporan tersebut, maka perlu beberapa orang anggota untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data, mengedit data dan membuat laporan berisi informasi kegiatan DLHK Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, tentang Tim Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester, LKPD, LPPD dan LKJiP.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonsesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan :

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTER, LKPD, LPPD & LKJIP.**

KESATU : Komposisi dan Personalia Tim, tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.  
 KEDUA : Tugas dan fungsi anggota tim adalah :

1. Mengumpul data, mengolah data, mengedit data dan menyusun dokumen Pelaporan Keuangan Semester, LKPD, LPPD dan LKJIP.
2. Mengkoordinasikan tahapan kegiatan dan data kebidang teknis guna memperoleh data yang valid tentang realisasi kegiatan sesuai perencanaan dan penganggaran pada RKA/RKAP & DPA/DPPA;
3. Melakukan evaluasi data yang telah terkumpul, diolah dan diedit sesuai keperluan laporan yang akan disusun;
4. Meneliti persediaan anggaran kas pada dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan saat pengajuan pencairan dana;
5. Mendokumentasi data secara baik dan benar untuk keperluan kebijakan pemerintah daerah maupun untuk keperluan permintaan data dari dinas terkait lainnya;
6. Menyusun Pelaporan Keuangan Semester, LKPD, LPPD dan LKJIP berdasarkan data realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta data pendukung lain sesuai laporan yang disusun;
7. Anggota tim wajib melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan dan yang direncanakan kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Anggota Tim dalam melaksanakan tugas harus memenuhi semangat kerja tanpa pamrih, aktif, mau belajar, teliti dan memiliki rasa kebersamaan dalam satu tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan, kegt. penyusunan pelaporan keuangan semester.

KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong  
 Pada tanggal : 03 Mei 2017

Plt. Kepala

**Drs. H. Muhammad Syaifuddin.**

Pembina Utama Muda/IVc  
 NIP. 19590808 199303 1 004



Lampiran : Surat Keputusan Kepala DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara  
Nomor : 660.1/311/SK-Set.3/DLHK/V/2017  
Tanggal : 03 Mei 2017

**Daftar Nama Tim Penyusunan  
Pelaporan Keuangan Semester, LKPD, LPPD & LKJiP  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Drs. H. Muhammad Syaifuddin	Pengarah	Plt. Kepala
2.	Abdulah Pannusu, SH.M.Si	Penanggung Jawab	Sekretaris
3.	Dra. A. Mujan Upat, M.Si	Ketua	Kasubag Penyusunan Program & Keuangan
4.	Ali Rizali, Amd. Kom	Sekretaris	Staf Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan
5.	Setia Umar Dani, SE	Anggota	Staf Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan
6.	Maris, SE	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
7.	Decky Asmara, A.Md	Anggota	Staf Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan
8.	Anjas Asmara	Anggota	Staf Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan
9.	Fauzan Hamdani	Anggota	Staf Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan
10.	Sri Rahmi Jumianti	Anggota	Staf Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan
11.	Fachruli Fardian	Anggota	Staf Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan
12.	Endri Pratama	Anggota	Staf Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan
13.	Arafiq	Anggota	Staf Sub Bagian Kepegawaian
14.	Jumri	Anggota	Staf Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

Plt. Kepala,

**Drs. H. Muhammad Syaifuddin**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19590808 199303 1 004

C. LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA BLHD 2016-2021

Tabel 8.1 Indikator Rencana Program Prioritas Kabupaten Kediri (Perencanaan Tahun 2016-2021)

Kategori	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Indikator	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi	Kategori	Indikator	Kategori																				
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi																										
11	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah	Uraian Wilayah																				
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20





















D. LAMPIRAN MATRIK RPJMD KABUPATEN 2016-2021

TABEL 9.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

INDIKATOR	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUL JAWAB
	KONDISI KINERJA AWAL 2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN</b>								
1 Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
2 Tingkat keputihan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
3 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
4 Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
5 Tingkat kelengkapan waktu palaporan capaian kinerja dan ketertarikan Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77,39	80	83	86	90	93	95	Dinas Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								Dinas Pendidikan
8 APK SD/MI	100,06	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
9 APK SMP/MTs	93	94	94,50	95	95,50	96	96,50	Dinas Pendidikan
10 APM SD/MI	99,65	99,66	99,67	99,68	99,69	99,70	99,71	Dinas Pendidikan
11 APM SMP/MTs	91,19	91,50	91,75	92	92,25	92,50	92,75	Dinas Pendidikan
12 Angka Putus Sekolah SD/MI	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
13 Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,011	0,010	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	Dinas Pendidikan
14 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100,02	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
15 Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	1 : 202	1 : 221	1 : 240	1 : 259	1 : 278	1 : 297	1 : 320	Dinas Pendidikan
16 Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	1 : 273	1 : 280	1 : 287	1 : 294	1 : 301	1 : 308	1 : 320	Dinas Pendidikan
17 Rasio gurun/mund SD/MI	1 : 15	1 : 16	1 : 17	1 : 18	1 : 19	1 : 20	1 : 22	Dinas Pendidikan
18 Rasio gurun/mund SMP/MTs	1 : 16	1 : 17	1 : 18	1 : 19	1 : 20	1 : 21	1 : 23	Dinas Pendidikan
19 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	28,67	30	40	50	60	70	80	Dinas Pendidikan
20 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	65	67	75	80	85	90	95	Dinas Pendidikan
21 Satu guru satu rumah	0	0	100 rumah	100 rumah	100 rumah	100 rumah	100 rumah	Dinas Pendidikan
22 Persentase sekolah yang memiliki Komputer dan Peralatan Bantu mengajar Modern dan Layak Pendidikan Menengah	17%	17%	25%	30%	40%	50%	60%	Dinas Pendidikan

RANCANGAN  
RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD BINAANGG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 % (285 org)	80 % (285 org)	85% (303 org)	87% (310 org)	90% (320 org)	90% (320 org)	90% (320 org)	Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	213	231	267	267	285	300	300	100% Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
5	Tingkat kelengkapan waktu pelaksanaan capaian Khas dan Keuangan	1 regulasi	24 doklap : 19 obyek	24 doklap : 45 obyek	24 doklap : 45 obyek	24 doklap : 45 obyek	24 doklap : 45 obyek	24 doklap : 45 obyek	144 obyek/45% Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
6	Cakupan Revisi Kelengkapan Pangan	1 regulasi	-	1 regulasi	1 regulasi	2 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	45 regulasi Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
7	Persentase Ketersediaan pangan utama Beras (%)	126,73%	129,71%	130,71%	131,35%	132,21%	133,29%	135,04%	135,04% Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
8	Ketersediaan (ton)	106.041.60	108.317.93	116.633.40	114.643.86	117.844.59	121.282.31	125.311.18	125.311.18 Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
9	Jumlah Penduduk (Jawa)	722.100	739.000	756.600	772.400	788.800	805.100	821.200	821.200 Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
10	Kebutuhan (jmh pend x 113 kg/kp/th)	81.597.30	83.507.00	85.405.40	87.281.20	89.134.40	90.976.30	92.795.60	92.795.60 Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
11	Skor Pola Pangan Harapan (P-PH) Ketersediaan	87,28	89,72	92,04	94,27	95,32	96,32	97,15	97,15 Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
12	Persentase desa Berstatus swasembada pangan Utama (beras) (%)	19,83% (47 desa)	20,67% (49 desa)	21,94% (52 Desa)	22,78% (54 Desa)	23,62% (56 Desa)	24,47% (58 Desa)	25,32% (60 Desa)	25,32% Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
13	Cakupan Desa mandiri pangan (DESA) (%)	18,56% (44 desa)	18,98% (45 desa)	19,41% (46 desa)	20,25% (48 Desa)	21,10% (50 Desa)	21,94% (52 Desa)	22,78% (54 Desa)	22,78% Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
14	Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan Konsumsi	91,30	91,60	91,90	92,20	92,50	92,80	93,00	93,00 Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
15	Cakupan Keamanan Pangan segar (%)	82	83	84	85%	86%	87%	88%	88% Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
16	Cakupan Bina Kelompok Tani (Madya dan Utama)	59	65	71	93	120	147	184	217 Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
17	Kelas Madya			67	83	100	117	144	167 Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
18	Kelas Utama			4	10	20	30	40	50 Badan Kelembanan Pa dan Penyuluhan
19	Cakupan Pelayanan Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluhan			70% (165 desa berpnyuluhan)	75% (177 desa berpnyuluhan)	80% (190 desa berpnyuluhan)	90% (213 desa)	95% (225 desa berpnyuluhan)	95% (225 desa berpnyuluhan) dan Penyuluhan
<b>10 URUSAN WAJIB PERTANAHAN</b>									
1	Cakupan terb. administrasi penguasaan tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
2	Persentase luas lahan bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
3	Persentase Penyelesaian kasus pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
<b>11 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP</b>									
1	Cakupan layanan administrasi perkenoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Badan Lingkungan H Daerah
2	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Badan Lingkungan H Daerah
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Badan Lingkungan H Daerah
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Badan Lingkungan H Daerah

INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2015	KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUL JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020		
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00 Badan Lingkungan Hid Daerah
6	Persentase Bank Sampah yang terbentuk di setiap desa/kelurahan	0,39 % (9)	0,42% (10)	0,63% (15)	12,77%(30)	15% (35)	29%(68)	1,00 Badan Lingkungan Hid Daerah
7	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	210 Kegiatan Usaha (42%)	95 Kegiatan Usaha (19%)	190 Kegiatan Usaha (38%)	285 Kegiatan Usaha (57%)	475 Kegiatan Usaha (95%)	500 Kegiatan Usaha (100%)	1,00 Badan Lingkungan Hid Daerah
8	Pemenuhan Status Mulu Air	12 anak sungai (40 %)	12 anak sungai (40 %)	12 anak sungai (40 %)	18 anak sungai (60 %)	25 anak sungai (83 %)	30 anak sungai (100 %)	1,00 Badan Lingkungan Hid Daerah
9	Persentase luasan lahan darat/air tanah untuk produksi biomassa yang telah dilepaskan dan dimanfaatkan selama kerusakannya	2.139.814 ha (50,80%)	3.238.874 ha (78%)	3.238.874 ha (84%)	3.238.874 ha (98,24%)	3.238.874 (100%)	3.238.874 (100%)	1,00 Badan Lingkungan Hid Daerah
10	Cakupan Pemetaan Status Lingkungan Hidup Daerah	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	1,00 (18 Kecamatan) Daerah
11	Persentase Jumlah Usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79
12	Luasan Wilayah Peleisir yang di konservasi	64 ha	20 ha	20 ha	18 ha	15 ha	15 ha	63 ha Badan Lingkungan Hid Daerah
13	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2)	0,44	0,4	0,35	0,3	0,25	0,15	0,19
<b>12 URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>								
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Kependudukan c
2	Tingkat kepatuhan aparat	100%	-	90 Pasang	90 Pasang	90 Pasang	90 Pasang	543 Dinas Kependudukan c
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Kependudukan c
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Kependudukan c
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Kependudukan c
6	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Kependudukan c
7	Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan	71%	81%	91%	94%	98%	100%	100% Dinas Kependudukan c
8	Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah	63%	69%	73%	78%	83%	88%	88% Dinas Kependudukan c
9	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	0,26%	-	25%	50%	75%	80%	100% Dinas Kependudukan c
10	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	89%	91%	93%	95%	97%	98%	100% Dinas Kependudukan c
11	Cakupan RT memiliki laptop	N/A	-	1.127 RT	1.931 RT	-	-	3.058 RT Dinas Kependudukan c
12	Cakupan RT yang menguasai Aplikasi Teknis Kependudukan	N/A	-	1.127 RT	1.931 RT	-	-	3.058 RT Dinas Kependudukan c
13	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat RT berbasis SI/AK	N/A	-	1.127 RT	1.931 RT	-	-	3.058 RT Dinas Kependudukan c
14	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	-	-	-	-	100% Dinas Kependudukan c









MISSION 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Sasaran Utama Peningkatan Fungsi dan Peran Pelayanan Publik	Strategi	Arah Kebijakan	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	SPD PEMANGGUNG JAWAB
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Kemampuan Tergorong Seiring
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Kemampuan Anggaran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Sarana/Prasarana





BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINEREA PEMBAWANGUNAN DAERAH	KONDISI KINEREA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINEREA					KONDISI KINEREA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020		
<b>10 URUSAN WAJIB PERTAMAAN</b>								
1 Cakupan terbit dan distribusi jargon-jargon rumah dinas Satu Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Sasaran) 3 rumah	
2 Cakupan terbit dan distribusi jargon-jargon rumah dinas Satu Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Sasaran) 3 rumah	
3 Cakupan terbit dan distribusi jargon-jargon rumah dinas Satu Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Sasaran) 3 rumah	
<b>11 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP</b>								
1 Cakupan layanan pemeliharaan pemukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Badan Lingkungan Hidup	
2 Tergal kebersihan aspal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Badan Lingkungan Hidup	
3 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Badan Lingkungan Hidup	
4 Cakupan penanganan sampah dan perawatan apungur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Badan Lingkungan Hidup	
5 Tergal kesadaran waktu pemukiman capaian tingkat dan kualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Badan Lingkungan Hidup	
6 Pemenuhan Bank Sampah yang terdapat di setiap RT/ RW	0,29 % (8)	0,42% (10)	0,83% (15)	12,77% (20)	15% (30)	20% (40)	100% Badan Lingkungan Hidup	
7 Pemenuhan Bank Sampah yang terdapat di setiap RT/ RW	210 Kegiatan Usaha (42%)	35 Kegiatan Usaha (70%)	180 Kegiatan Usaha (36%)	380 Kegiatan Usaha (76%)	475 Kegiatan Usaha (95%)	500 Kegiatan Usaha (100%)	100% Badan Lingkungan Hidup	
8 Pemenuhan Bank Sampah yang terdapat di setiap RT/ RW	12 msk sampah (40 %)	3.238,874 m (75%)	12 msk sampah (40 %)	20 msk sampah (60 %)	25 msk sampah (63 %)	30 msk sampah (75 %)	100% Badan Lingkungan Hidup	
9 Pemenuhan Bank Sampah yang terdapat di setiap RT/ RW	2.139,814 ha (50,80%)	3.238,874 ha (75%)	3.238,874 ha (84%)	3.238,874 ha (98,24%)	3.238,874 (100%)	3.238,874 (100%)	100% Badan Lingkungan Hidup	
10 Pemenuhan Bank Sampah yang terdapat di setiap RT/ RW	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% Badan Lingkungan Hidup	
11 Pemenuhan Bank Sampah yang terdapat di setiap RT/ RW	0,87	0,88	0,71	0,75	0,77	0,79	100% Badan Lingkungan Hidup	
12 Pemenuhan Bank Sampah yang terdapat di setiap RT/ RW	64 ha	0,88	0,71	0,75	0,77	0,79	100% Badan Lingkungan Hidup	
13 Pemenuhan Bank Sampah yang terdapat di setiap RT/ RW	0,44	0,4	0,35	0,25	0,19	0,19	100% Badan Lingkungan Hidup	
<b>12 URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL</b>								
1 Cakupan layanan administrasi pendaftaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2 Tergal kebersihan aspal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
3 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
4 Cakupan penanganan sampah dan perawatan apungur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
5 Tergal kesadaran waktu pemukiman capaian tingkat dan kualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
6 Cakupan layanan informasi administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
7 Pemenuhan Bank Sampah yang terdapat di setiap RT/ RW	71%	81%	91%	94%	98%	98%	100% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
8 Radio Pralayanan Non Midian Berbasis Nilai	63%	68%	73%	78%	83%	88%	100% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
9 Pemenuhan Kemitraan Antar Kecamatan	0,25%	-	25%	50%	75%	80%	100% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
10 Pemenuhan Kemitraan Antar Kecamatan	89%	91%	93%	97%	98%	98%	100% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	





KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SPD PENANGGUNG JAWAB
	2016	2017	2018	2019	2020		
10	Catatan Pengawasan Perubahan Perumahan Suku Desa Sulu, Periyudo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	URUSAN WAIB BERHAKMANN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Catatan verifikasi administrasi pengurusan tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Perizinan dan pemenuhan saku perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	URUSAN WAIB LINGKUNGAN HIDUP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Catatan upaya administrasi perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat kepatuhan aparat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Catatan Pengawasan Kelembagaan Suku Desa Katalu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Catatan pengawasan sarana dan prasarana sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat kesadaran masyarakat pemenuhan kewajiban dan kewajiban	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemenuhan Suku Sampah yang terencana dan terdistribusi	0,38 % (9)	0,42% (10)	0,51% (13)	1,5% (39)	2,9% (69)	2,9% (69)
7	Catatan Pengawasan Pemenuhan Perumahan	210 Kegiatan Usaha (42%)	190 Kegiatan Usaha (38%)	285 Kegiatan Usaha (57%)	380 Kegiatan Usaha (76%)	475 Kegiatan Usaha (95%)	500 Kegiatan Usaha (100%)
8	Pemenuhan Suku Sampah yang terencana dan terdistribusi	12 anak sungai (40 %)	12 anak sungai (40 %)	18 anak sungai (60 %)	20 anak sungai (67 %)	25 anak sungai (83 %)	30 anak sungai (100 %)
9	Pemenuhan Suku Sampah yang terencana dan terdistribusi	2.138,81 ha (50,80%)	3.238,87 ha (75%)	3.238,87 ha (84%)	3.238,87 ha (100%)	3.238,87 ha (100%)	3.238,87 ha (100%)
10	Catatan Pengawasan Suku Sampah yang terencana dan terdistribusi	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)
11	Pemenuhan Suku Sampah yang terencana dan terdistribusi	0,97	0,99	0,77	0,75	0,77	0,78
12	Catatan Pengawasan Suku Sampah yang terencana dan terdistribusi	64 ha	20 ha	18 ha	15 ha	15 ha	15 ha
13	Pemenuhan Emit Gas Rumah Kaca (CO2)	0,44	0,4	0,35	0,25	0,19	0,19
12	URUSAN WAIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Catatan layanan administrasi pendaftaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat kepatuhan aparat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Catatan Pengawasan Kelembagaan Suku Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Catatan pengawasan sarana dan prasarana sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat kesadaran masyarakat pemenuhan kewajiban dan kewajiban	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Catatan Layanan Informasi Administrasi dan Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pemenuhan Suku Sampah yang terencana dan terdistribusi	7,1%	8,1%	9,4%	9,6%	9,8%	9,8%
8	Rasio Pendaftaran Non Muslim Berakta Mula	0,33%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
9	Pemenuhan Kependudukan Mula Kelahiran	89%	91%	93%	97%	98%	100%



## E. LAMPIRAN MATRIK RENJA DLHK TAHUN ANGGARAN 2016-2021

### PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Dalam tahun anggaran 2017 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan tujuannya adalah sebagai berikut :

NO	Program/Kegiatan	Indikator	Target Outcome/ Output)	Indikator Hasil	Target Hasil
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 rekening	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik	100%
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	7 jenis	Tersedianya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	24 kendaraan	Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional	100%
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	10 jenis	Tersedianya alat tulis kantor	100%
5	Penyediaan komponen instalasi	Penyediaan Peralatan Listrik	6 jenis	Tersedianya Kebutuhan Alat	100%

	listrik/penerangan bangunan kantor	dan Elektronik		Listrik dan Elektronik	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan	3900 exp	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku perpustakaan	100%
7	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Peralatan kebersihan kantor	11 jenis	Terpeliharanya Kebersihan Ruangan Kantor	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	7 rapat	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Pegawai, dan Tamu	9 rapat
9	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah Honorarium Bulanan dan Tenaga Honorer	96 Ob	Tersedianya Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	100%
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	5 jenis	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 rapat	Tercapainya Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan DLHK	100%
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
12	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Kursi Lipat	50 Unit	Bertambahnya Mebeleur Kebutuhan Rapat	100%
13	Pemerliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor Secara Rutin/Berkala	3 jenis	Tercapainya Penempatan Plank Titik Penataan Pada Lokasi, dan Terpeliharanya Kebersihan Kantor	100%
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur</b>				
14	Penyusunan Profil DLHK Kabupaten	Pengadaan Keperluan Data Kepegawaian	4 jenis	Tersedianya Profil, Daftar Urutan Pegawai, Kendali Kenaikan Pangkat, dan Kendali Kenaikan Gaji Berkala PNS DLHK	4 Dokumen
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				

15	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5 Dokumen	Peningkatan tata pemerintahan yang baik, jujur, bertanggung jawab, akutabel dan tertib administrasi pelaporan keuangan	100%
16	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	Pelaksanaan Pembayaran Hutang Tahun Anggaran 2016 pada Pihak Ketiga	7 Paket	Tercapainya Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2016	100%
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>				
17	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sampah Produsen/Industri di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sampah	1 Paket	Tercapainya Jumlah Produsen/Industri Persampahan yang Dievaluasi	75%
18	Pembinaan Pengurangan Sampah	Terbentuknya Bank Sampah	5 Kecamatan	Menjaga agar Kebijakan yang sedang Diimplementasikan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran	100%
<b>VI</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>				
19	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Jumlah Laporan Perusahaan yang Wajib Proper Lokal, Properda dan Propernas	95 Laporan Perusahaan	Terlaksananya Kegiatan Properda dan Propernas Bagi Perusahaan Tambang Batubara/Migas/Sawit/Industri/HTI	95%
20	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	130 Dokumen ijin lingkungan	Ijin Lingkungan	100%
21	Monitoring dan Evaluasi Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi terhadap Izin Lingkungan	100 ijin lingkungan	Ketaatan Pelaku Usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan rekomendasi dan izin lingkungan	100%
22	Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara Beserta Display Scree	Jumlah Alat Pantau	1 Unit	Pendektesian Tingkat Pencemaran Kualitas Udara di Kecamatan Tenggarong	100%

23	Pemantauan Kualitas Udara dan Air	Jumlah Obyek dan Titik Pantau	50 titik pantau 4 Kecamatan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Khususnya Kualitas Udara dan Air	100%
24	Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Air Limbah dan Kualitas Udara Bagi Pelaku Usaha dan Atau Kegiatan Skala ANDAL dan UKL-UPL	Data Masyarakat/Perusahaan yang Mengelola Air Limbah dan Kualitas Udara	7 Dokumen	Peningkatan Data Masyarakat/Perusahaan yang Mengelola Air Limbah dan Kualitas Udara	100%
25	Penanganan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Penanganan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	11 Kali	Peningkatan Jumlah Penanganan dan Pemulihan	100%
26	Penegakan Hukum Lingkungan	Masyarakat yang Paham Tentang Hukum Lingkungan Hidup	90%	Peningkatan Masyarakat yang Memahami Hukum Lingkungan	90%
27	Evaluasi Perijinan Penyimpan Sementara Limbah B3	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Ekonomi yang Tidak Berwawasan Lingkungan	1 Dokumen	Teratasinya Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Terkendalinya Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	90%
<b>VII</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>				
28	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup	100 Peserta	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan perundang-undangan lingkungan hidup	100%
29	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Prosentase Penanganan Pengaduan	80%	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Lingkungan	100%
30	Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Pelaksanaan Lomba	1 Lomba	Terwujudnya Pemahaman tentang Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat, Mahasiswa, dan Pelajar	100%

<b>VII I</b>	<b>Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>				
31	Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online	Jumlah Media Cetak Dalam Publikasi Event Daerah yang Terselenggara	48 Media Cetak/ Pemuatan	Terpublikasinya Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online	90%
<b>IX</b>	<b>Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>				
32	Penguatan Perencanaan Program Lingkungan antar Daerah Provinsi dan Pusat	Jumlah Aparatur dan Fasilitas Perencanaan Program dan Kegiatan	32 Kali	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan	6 Dokumen
<b>X</b>	<b>Program Rehab Lahan Kritis</b>				
33	Pemeliharaan DAS atas IPPHK An. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kawasan yang Direhabilitasi	23 Ha	Tercapainya Rehabilitasi Lahan Kritis	100%

F. LAMPIRAN REKAPITULASI RKA/RKAP TAHUN ANGGARAN 2017

KODE Prose/ Kest.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KONSEWA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		%
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	6	1.656.923.488,83	2.195.807.286,79	538.883.807,96	32,52	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tenggorong	49 rekening	1	227.818.251,84	230.818.251,84	3.000,00,00	1,32	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertolongan kantor	Tenggorong	7 jenis	1	0,00	41.672.000,00	41.672.000,00	0,00	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertolongan kendaraan dinas/operasional	Tenggorong	24 kendaraan	1	220.108.400,00	220.108.400,00	0,00	0,00	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tenggorong	10 jenis	1	65.065.357,00	77.331.351,00	12.265.994,00	18,85	
11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor DLHK	6 jenis	2	0,00	6.642.000,00	6.642.000,00	0,00	
14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tenggorong	3900 DDP	2	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
15	Penyediaan bahan logistik kantor	Tenggorong	11 jenis	2	0,00	6.381.000,00	6.381.000,00	0,00	
16	Penyediaan makanan dan minuman	Tenggorong	7 kali rapat	1	7.919.081,47	15.473.081,47	7.554.000,00	95,39	
18	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	SKPD	96 DP	2	820.416.960,00	962.150.980,00	141.734.020,00	17,28	
19	Penyediaan barang cetakan dan pengarsipan	Tenggorong	5 jenis	1	18.659.419,52	26.129.420,48	7.470.000,96	40,03	
20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Tenggorong	50 rapat	1	296.936.019,00	509.100.812,00	212.164.793,00	71,45	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		0,00	49.845.000,00	49.845.000,00	0,00	
10	Pengadaan meubelur	DLHK	50 Unit	2	0,00	22.845.000,00	22.845.000,00	0,00	
22	Pemeliharaan rutin/periodik gedung kantor	DLHK	3 jenis	2	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4	Penyusunan Profil DLHK Kabupaten	Kota Tenggorong	4 jenis	2	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DLHK	100 %		0,00	1.306.046.750,00	1.306.046.750,00	0,00	
2	Penyusunan laporan keuangan sederhana	DLHK	5 Dokumen	2	0,00	95.847.000,00	95.847.000,00	0,00	

Formulir RKAP 2017

Halaman 1



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Tahun Anggaran 2017

Formulir  
RKAP SKPD  
2.2

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BIAYA/ (BERSUBANSI)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	3	4	5	6	7	8	9	10
15	134	Tenggarong	7 Paket 100 %	2	0,00	1.210.199.750,00	1.210.199.750,00	0,00
15	43	Tenggarong, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Loe Kulu	1 Paket	2	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
15	44	5 Kecamatan Kab. KLUAR	5 Kecamatan (Kec. Tenggarong, Kec. Loe Kulu, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Ma. Batak, Kec. Ma. Topy)	2	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
16	9	Kabupaten Kutai Kartanegara	95 Laporan Perusahaan	2	2.000.000.000,00	753.375.000,00	(1.246.625.000,00)	(62,33)
16	18	Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Jakarta	130 dokumen jln lingkungan	2	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
16	19	Kota Samarinda	100 jln lingkungan	2	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
16	20	Kota Samarinda	1 Unit	2	1.700.000.000,00	28.375.000,00	(1.671.625.000,00)	(98,33)
16	21	Tenggarong	50 Tpk Pantau 4 kecamatan	2	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
16	22	Tenggarong	7 Dokumen	2	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
16	23	Kota Samarinda	11 Kali	2	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
16	24	Kota Samarinda	90 %	2	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
16	25	Kota Samarinda	1 Dokumen	2	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
18	9	Kota Samarinda	100 %	2	0,00	139.372.800,00	139.372.800,00	0,00
18	10	Kota Samarinda	100 Peserta	2	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
18	12	Kota Samarinda	80 %	2	0,00	69.372.800,00	69.372.800,00	0,00
19	12	Kota Samarinda	1 Lomba	2	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
19	19	Kota Samarinda	1 Lomba	2	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00

Formulir NUPP SPPD 2.2

Halaman 2

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELAJAR LANGSUNG MEMENUHI PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7		9	10
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
KODE PROG./ KEA.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KONCRETA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	(Rp)	%
25	6	Publisa Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online	Kota Tenggara	48 Media Cetak / Penunjan	2	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
	3	Program Perencanaan Perhubungan dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Tenggara	100 %	2	0,00	83.670.300,00	83.670.300,00	0,00
	3	Pengujian Perencanaan Program Lingkungan antar Daerah, Provinsi dan Pusat	Kota Tenggara	32 kali	2	0,00	83.670.300,00	83.670.300,00	0,00
27	1	Program Rehabi Lahan Kritis	Kawasen Delta Mahakam (Desa Seputih Kec. Anggana)	23 Ha	2	0,00	88.725.500,00	88.725.500,00	0,00
	1	Pemeliharaan DAS atas IPKCH An. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kawasen Delta Mahakam (Desa Seputih Kec. Anggana)	23 Ha	2	0,00	88.725.500,00	88.725.500,00	0,00
<b>JUMLAH</b>						3.656.923.488,83	4.851.842.646,79	1.194.919.157,96	32,68

Tenggarong, 03 October 2017  
  
**Drs. H. MUHAMMAD SYALTURRODDIN**  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NIP. 1959088 199303 1 004



G. LAMPIRAN REKAPITULASI TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

REKAPITULASI TARGET PERJANJIAN KINERJA YANG INGIN DICAPAI				
TAHUN ANGGARAN 2017				
				RKAP 2017
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Aparatur BLHD Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air DAN Listrik	48 Rekening 12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230,818,251.00
	Tersedia kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis 12 bulan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,672,000.00
	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	24 Kedaraan 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	220,108,400.00
	Tersedianya Perlengkapan Alat Tulis Kantor	10 Jenis 12 Bulan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	77,331,351.00
	Tersedianya Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik	6 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,642,000.00
	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3.900 EXP	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000.00
	Terpeliharanya Kebersihan Ruangan Kantor	11 Jenis	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,381,000.00
	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	9 kali Rapat 12 Bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	15,473,081.00
	Tersedianya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	96 Ob 12 Bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	962,150,980.00
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis 12 Bulan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,129,420.00
	Tercapainya koordinasi, konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan BLHD	50 kali rapat 12 Bulan	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	509,100,812.00
	Bertambahnya Meubeleur Kebutuhan Rapat	50 Unit	Pengadaan Mebeleur	22,845,000.00
	Tercapainya Penempatan Plank Titik Penataan pada Lokasi dan Terpeliharanya Kebersihan Kantor	3 Jenis	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	27,000,000.00
	Tersedianya Profil, Daftar Urutan Pegawai, Kendali Kenaikan Pangkat, dan Kendali Kenaikan Gaji Berkala PNS DLHK	4 Dokumen	Penyusunan Profil DLHK Kabupaten	25,000,000.00
	Peningkatan Tata Pemerintah yang baik, Jujur, Bertanggung Jawab, Akutabel dan Terib Administrasi Pelaporan Keuangan	5 Dokumen	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	95,847,000.00
	Tercapainya Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016	7 Paket	Fasilitasi Penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga	1,210,199,750.00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Tercapainya Jumlah Produsen/Industri Persampahan yang di Evaluasi	1 Paket	Monitoring dan evaluasi penanganan sampah produsen/industri di Kabupaten Kutai Kartanegara	70,000,000.00
	Menjaga agar Kebijakan yang sedang Diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan Sasaran	5 Kecamatan	Pembinaan pengurangan sampah	70,000,000.00
	Terlaksananya Kegiatan Properda dan Propernas bagi Perusahaan Tambang Batubara/ Migas/ Sawit/ Industri/ HTI	95 Laporan Perusahaan	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)	50,000,000.00
Aparatur BLHD Kab. Kutai Kartanegara	Penyusunan Dokumen Lingkungan yang sesuai dengan norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah yang meliputi dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL	130 dokumen ijin lingkungan	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100,000,000.00
	Ketaatan pelaku usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	100 ijin lingkungan	Monitoring dan Evaluasi Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200,000,000.00
	Pendeteksian Tingkat Pencemaran Kualitas Udara di Kecamatan Tenggarong	1 Unit	Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara Beserta Display Sreen	28,375,000.00
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Khususnya Kualitas Udara dan Air	50 Titik Pantau 4 Kecamatan	Pemantauan Kualitas Udara dan Air	150,000,000.00
	Peningkatan Data Masyarakat/Perusahaan yang Mengelola Air Umum dan Kualitas Udara	7 Dokumen	Evaluasi Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Air Umum dan Kualitas Udara Bagi Pelaku Usaha dan Atau Kegiatan Skala ANDAL dan UKL_UPL	40,000,000.00
	Peningkatan Jumlah Penanganan dan Pemulihan	11 Kali	Penanganan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	50,000,000.00
	Peningkatan Masyarakat yang Memahami Hukum Lingkungan	90%	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	75,000,000.00
	Teratasinya Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Terkendalinya Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	1 Dokumen	Evaluasi Perijinan Penyimpan Rencana Limbah B3	60,000,000.00
	Meningkatkan pengetahuan, Pemahaman dan Pelaksanaan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	100 Peserta	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	40,000,000.00
	Jumlah Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dapat diselesaikan	80%	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	69,372,800.00
	Terwujudnya Pemahaman tentang Lingkungan Hidup kepada Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar	1 Lomba	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Bidang Lingkungan	30,000,000.00

<b>SASARAN SRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Terpublikasinya Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online	48 Media Cetak / Pemuatan	Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online	70,000,000.00
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan	32 Kali	Penguatan Perencanaan Program Lingkungan antar Daerah, Provinsi dan Pusat	83,670,300.00
	Tercapainya Rehabilitasi Lahan Kritis	23 Ha	Pemeliharaan DAS atas IPPKH An. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	88,725,500.00
				<b>4,851,842,655</b>





**RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELAJAR, TIDAK LANGSUNG  
SATUAN KERJA PEANGKAT DARAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/ (BERKURANG)	(Rp)	%
		Berdasarkan Perhitungan		Jumlah	Berdasarkan Perhitungan		Jumlah							
		Volume	Satuan		Volume	Satuan								
3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11	12					
5.1.1.01.06	Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Bersa Tunjangan Bersa - Tunjangan Bersa Tunjangan PPh/Tunjangan Ihtuas - Tunjangan PPh/Tunjangan Ihtuas	1	L5	546.304.500,00	546.304.500,00	1	L5	135.230.300,00	135.230.300,00	(411.074.200,00)	(75,25)			
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Ihtuas - Tunjangan PPh/Tunjangan Ihtuas	1	L5	831.381.600,00	831.381.600,00	1	L5	243.030.657,00	243.030.657,00	(588.350.943,00)	(70,77)			
5.1.1.01.08	Pembuktian Gaji - Pembuktian Gaji	1	L5	320.435,50	320.435,50	1	L5	60.195,16	60.195,16	(260.240,34)	(81,21)			
5.1.1.01.21	Iuran BPJS Kesehatan - Iuran BPJS Kesehatan	1	L5	482.646.834,00	482.646.834,00	1	L5	112.101.716,20	112.101.716,20	(370.545.117,80)	(76,77)			
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1	L5	37.858.744,00	37.858.744,00	1	L5	8.153.201,58	8.153.201,58	(29.705.542,42)	(78,46)			
5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kesehatan (JKK) - Iuran Jaminan Kesehatan (JKK)	1	L5	43.184.173,00	43.184.173,00	1	L5	10.191.481,73	10.191.481,73	(32.992.691,27)	(76,40)			
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PHS - Iuran Jaminan Kesehatan (JKK)	1	L5	43.184.173,00	43.184.173,00	1	L5	10.191.481,73	10.191.481,73	(32.992.691,27)	(76,40)			
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya Insentif Daerah - Insentif Daerah - Umpukan	1	L5	4.963.828.800,00	6.450.148.800,00	1	L5	3.167.869.593,00	3.925.986.593,00	(2.524.162.207,00)	(39,13)			
		1	L5	1.486.320.000,00	4.963.828.800,00	1	L5	758.117.000,00	3.167.869.593,00	(1.795.959.207,00)	(36,18)			
					6.450.148.800,00			3.167.869.593,00	3.925.986.593,00	(2.524.162.207,00)	(39,13)			
					1.486.320.000,00			758.117.000,00	3.167.869.593,00	(1.795.959.207,00)	(36,18)			
								758.117.000,00	758.117.000,00	(48.99)	(48,99)			

Formulir R00P SPOD 2.1


Halaman 2

**RINCIAN BENCANA KERJA ANGGARAN BELAJA TIDAK LANGSUNG  
SITUASI KERJA PERAKSIKTI DAERAH**


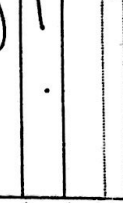


KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BANTARAN/ (BERKURANG)	%		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah				
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11	12

**RENCANA PERALIHAN DANA PER TITULUM**

Titulan I Rp 2.266.020.000,00  
 Titulan II Rp 2.266.020.000,00  
 Titulan III Rp 2.266.020.000,00  
 Titulan IV Rp 2.266.016.414,95  
 Jumlah Rp 9.064.076.414,95

Tangerang, 03 October 2017  
**PENGALIH ANGGARAN**  
  
**DWI. H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN**  
 NIP. 19590808 199303 1 004

**TM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kendra Cahak, SE, M.Si	19781005 200112 1 005	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana &	
2	I. Hemanah, SE, M.Si	19790801 200112 1 001	Kabid Akurasi	
3	Dr. Bahari Jusaksana, S.Pi, MEd	19672309 199801 1 005	Kabid Pengendalian, Kebijakan Perencanaan	
4	Fauziah, S.Sos., Msi	19711021 200112 1 003	Kepala Bagian Pembangunan	

I. LAMPIRAN SK PIt. KEPALA DINAS TAHUN 2017



**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT PERINTAH**  
No. 821.2/III.1 - 6.3 / A.P/I/BKPPD/2017

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS**  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;  
2. Peraturan Daerah Kab. Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;  
3. Surat Kepala BKN Tanggal 5 Februari 2016 Nomor : K.26-30/V.20-3/99;  
4. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.1-967/A.SK/XII/BKD/2016 Tanggal 30 Desember 2016 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara.

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : Nama : ABDULLAH PANNUSU SH., M.Si  
NIP : 19660804 199303 1 005  
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I/ IV/b  
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 05 Januari 2017 disamping jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditunjuk pula sebagai Pelaksana Tugas (Pt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara.  
2. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas tidak Berwenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat Strategis yang berdampak pada perubahan status hukum, pada aspek kepegawaian.  
3. Hal - hal yang bersifat prinsip agar dikonsultasikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  
4. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 5 Januari 2017

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDYASARI**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kukar di- Tenggarong
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kukar di- Tenggarong
4. Arsip -





## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

### SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

No. 821.2/III.1 - 147 / A.P/III/BKPPD/2017

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
  2. Peraturan Daerah Kab. Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
  3. Surat Kepala BKN Tanggal 5 Februari 2016 Nomor : K.26-30/V.20-3/99;
  4. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.1-967/A.SK/XII/BKD/2016 Tanggal 30 Desember 2016 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara.

#### MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama : Drs. M. SYAIFUDIN  
NIP : 19590808 199303 1 004  
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 disamping jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ditunjuk pula sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas tidak Berwenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat *Strategis* yang berdampak pada perubahan status hukum, pada aspek kepegawaian.
  3. Dengan ditetapkannya Surat Perintah ini maka Surat Perintah yang ditetapkan sebelumnya Nomor : 821.2/III.1-6.3/A.P/1/BKPPD/2017 tertanggal 5 Januari 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  4. Hal – hal yang bersifat prinsip agar dikonsultasikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  5. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 24 Maret 2017



#### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kukar di- Tenggarong
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang di- Tenggarong
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kukar di- Tenggarong
5. Arsip -



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 321.2/III.1- 01 /A.SK/1/BKPSDM/2018

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 11, daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin;
3. Direktur PT.TASPEN (Persero) Cabang Samarinda di Samarinda;
4. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Kartanegara
6. Sdr. ALFIAN NOOR, SE.. Tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 08 Januari 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

t t d

**EDI DAMANSYAH**

Untuk petikan yang sah  
Sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. H. MARKI M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590206 198802 1 002